



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN NUMBER : 930/69/I-BPKAD/2022

ABOUT

APPOINTMENT OF OFFICIALS WHO HAVE THE AUTHORITY TO SIGN INSTRUCTIONS TO PAY (SPM) AND WHO SIGNIFY INSTRUCTIONS TO TAKE RESPONSIBILITY (SPJ) IN THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN FISCAL YEAR 2022

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/080/SEK-KEU/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Permohonan Usulan Pejabat Penandatanganan SPM dan SPJ Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/69/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	H.M. Yadi Robyan Noor, SE, M.TP NIP. 19620721 198811 1 001 Pembina Utama IV/e	Kepala Dinas	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	H. Warsito, ST NIP. 19700509 199203 1 008 Penata Tingkat I III/d	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Sekretariat	
3.	Heni Purwaningsih, S.Si, M.Si NIP. 19730314 199803 2 009 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Perdagangan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Perdagangan	
4.	Atikah, SE NIP. 19641213 199103 2 006 Pembina IV/a	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Koperasi dan UKM	
5.	Zainuddin Panani, SE NIP. 19680312 199303 1 007 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelatihan Koperasi	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ UPTD Pelatihan Koperasi	
6.	Nazly, S.Pi NIP. 19680223 199703 2 003 Penata Tingkat I III/d	Kepala UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	
7.	H. Warsito, ST NIP. 19700509 199203 1 008 Penata Tingkat I III/d	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar	

8.	Ronny Suhendra, ST NIP. 19750511 200212 1 005 Penata Tingkat I III/d	Kepala Bidang Industri	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Industri	
----	----------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------	--

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR